

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DESA WISATA BERBASIS DIGITAL TOURISM DI PROVINSI JAWA BARAT: ISU DAN TANTANGAN

Development of Digital Tourism-Based Village Tourism Policy in West Java Province: Issues and Challenges

DIAN HERDIANA

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No 105 Kota Bandung, Indonesia 40614

*Email: dianherdiana@uinsgd.ac.id

Diterima 26 September 2022 / Disetujui 17 Oktober 2022

ABSTRACT

West Java Province has many tourist villages that have been managed well, even though these tourist villages have not been fully oriented to become tourist objects based on digital tours. This article examines the issues and challenges of digital tourism-based village management in West Java Province based on this description. The research method uses qualitative research with a literature study approach. The analysis results show that the existing issues cover at least three things: The readiness of information technology infrastructure. Second, increasing the capacity of local resources. Third, local government support. The challenges in policy development are a synergy between stakeholders, policy consistency, and adequate budget support. These issues and challenges must be addressed as opportunities to develop tourist villages in West Java Province based on digital tourism.

Keywords: digital tourism, tourism policy, tourism village.

ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat memiliki banyak desa wisata yang sudah dikelola dengan baik, meskipun demikian desa wisata tersebut belum sepenuhnya diorientasikan untuk menjadi objek wisata berbasis digital tourism. Didasarkan kepada gambaran tersebut artikel ini mengkaji mengenai isu dan tantangan kebijakan pengelolaan desa wisata berbasis digital tourism di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu yang ada setidaknya mencakup tiga hal yaitu: Pertama, kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya lokal. Ketiga, dukungan pemerintah daerah. Adapun tantangan dalam pengembangan kebijakan yaitu sinergitas antar pemangku kepentingan, konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai. Isu dan tantangan tersebut harus disikapi sebagai peluang untuk mengembangkan desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat berbasis kepada digital tourism.

Kata kunci: desa wisata, digital tourism, kebijakan pariwisata.

PENDAHULUAN

Pariwisata di Provinsi Jawa Barat menjadi sektor yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah, sektor pariwisata telah turut berkontribusi baik dalam bentuk pendapatan asli daerah maupun dalam bentuk lainnya seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat (Indira *et al.*, 2013; Nandi 2005). Pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi masyarakat yang apabila dikembangkan akan berpotensi terhadap perbaikan berbagai aspek mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat.

Salah satu upaya yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mengembangkan pariwisata yaitu mengembangkan desa wisata di berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, salah satu tujuannya yaitu guna membangun identitas dan jati diri serta mempercepat pembangunan (Afriza *et al.*, 2020).

Berbagai desa yang ada di Jawa Barat sampai dengan saat ini sudah berkembang pesat yang banyak di antaranya sudah berkembang menjadi desa wisata. Desa-desa wisata ini mengelola pariwisata desa berdasarkan potensi desa yang dimilikinya masing-masing, terdapat desa wisata budaya yang menyajikan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari pariwisata, terdapat juga desa wisata lainnya seperti desa wisata alam yang mana keindahan alam dijadikan sebagai potensi pariwisata yang ada di desa tersebut (Raharja *et al.*, 2019; Suryanti 2013).

Adanya pandemi Covid-19 yang telah berlangsung semenjak tahun 2020 telah memukul industri pariwisata termasuk di dalamnya desa pariwisata. Adanya batasan perjalanan dan batasan berkerumun menjadikan berbagai objek wisata yang selama ini menjadi potensi desa wisata menjadi sepi pengunjung yang berakibat tidak hanya kepada

berhentinya aktivitas pariwisata, tetapi juga kepada berhentinya sumber perekonomian masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata (Pradana and Mahendra 2021; Ratna *et al.*, 2021).

Kondisi pandemi Covid-19 sebagaimana dijelaskan tersebut mendorong berbagai pihak untuk mencari alternatif jenis pariwisata yang tetap dapat terselenggara sekalipun kondisi sosial masyarakat mengalami gangguan, khususnya desa wisata yang mana desa mengalami kondisi sulit selama Pandemi Covid-19. Salah satu alternatif yang muncul yaitu mendorong desa wisata untuk mengadopsi pariwisata digital sebagai salah satu upaya untuk mendorong pariwisata yang selama Covid-19 mengalami keterpurukan (Atmoko 2020; Pradana and Mahendra 2021).

Pariwisata berbasis *digital tourism* pada dasarnya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk kemudian dijadikan bagian dari bisnis pariwisata. Dalam prakteknya *digital tourism* dapat berbentuk berbagai jenis mulai dari promosi pariwisata berbasis pemanfaatan teknologi informasi sampai dengan penjualan produk-produk pariwisata secara digital yang memungkinkan adanya interaksi di dunia virtual antara penyedia jasa wisata dengan para wisatawan (Anggariani dan Paramartha, 2021; Aryawati, 2020).

Pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* dalam prosesnya memerlukan berbagai prakondisi untuk dapat berhasil yang salah satunya yaitu adanya infrastruktur teknologi informasi yang memadai guna menunjang aktivitas pariwisata yang akan dilaksanakan, faktor lainnya yaitu baik penyedia pariwisata maupun para wisatawan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pemanfaatan teknologi informasi sehingga barang dan jasa wisata dapat diproduksi dan dinikmati dengan baik.

Kondisi adanya tuntutan infrastruktur teknologi informasi yang baik guna mengembangkan desa wisata berbasis *digital tourism* nyatanya menjadi salah satu kendala yang dihadapi, mengingat tidak semua desa yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga hal ini akan menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan kebijakan desa wisata berbasis *digital tourism*.

Didasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka artikel ini ditujukan guna menggambarkan apa saja isu dan tantangan dalam pengembangan kebijakan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat. Adanya identifikasi isu dan tantangan akan bermanfaat bagi pengambilan kebijakan dalam menyusun desa wisata berbasis *digital tourism* yang baik di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode penelitian kualitatif dianggap relevan karena sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak menggambarkan secara naratif mengenai bagaimana pengembangan desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat dilihat dari perspektif *digital tourism* (Creswell, 2014; Mirzaqon dan Purwoko, 2017). Dalam uraian dan pembahasan sajian analisis berupa uraian kata-kata mengenai tema yang tengah dibahas dan bukan kepada penyajian data berdasarkan kepada hasil perhitungan statistik. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk uraian kata-kata dan bukan kepada hasil perhitungan statistik (Sugiyono, 2008).

Sumber data dalam penulisan artikel ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang tengah dikaji. Berbagai data tersebut diolah melalui tiga proses yaitu proses *check*, *re-check* dan *cross-check* yang mana antara data satu dan data lainnya akan dibandingkan dan dianalisis yang kemudian disajikan dalam hasil pembahasan. Proses ini diharapkan menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan kondisi alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam artikel ini dibagi kedalam 3 (tiga) bagian utama yang terdiri dari: Pertama, isu yang muncul dalam pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat. Kedua, tantangan yang muncul dalam pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat. Ketiga, manfaat yang akan didapat dalam pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat. Ketiga uraian tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Isu yang Muncul dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Digital Tourism* di Provinsi Jawa Barat

Pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak serta merta dapat diterapkan tanpa terkendala, mengingat pengembangan desa wisata yang berbasis *digital tourism* memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari kegiatan pariwisatanya. Adapun isu yang muncul setidaknya terdiri dari 3 isu utama, yaitu:

a. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengelolaan pariwisata yang berbasis kepada *digital tourism* merupakan jenis pariwisata yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari kegiatan pariwisatanya, sehingga ketersediaan infrastruktur teknologi informasi

menjadi bagian penting dan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan *digital tourism* tersebut. Dikaitkan dengan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* maka adanya infrastruktur teknologi informasi yang baik di desa menjadi mutlak guna menunjang kegiatan desa wisata dan menjadi faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan desa wisata tersebut.

Kondisi infrastruktur yang ada saat ini sudah dapat dikatakan baik yang mana hampir semua daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat sudah dapat diakses dengan jaringan teknologi informasi, namun yang menjadi masalah yaitu pemerataan infrastruktur teknologi informasi yang kurang merata, semisal jaringan internet di setiap desa berbeda-beda, terlebih lagi bagi desa yang terpencil yang sulit diakses.

Kondisi ketersediaan infrastruktur teknologi informasi inilah yang menjadi isu dalam pengelolaan desa wisata berbasis digital, sehingga dikhawatirkan adanya masalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi akan menjadi penghambat dalam kesuksesan penyelenggaraan pengelolaan *digital tourism*.

Permasalahan ini harus disikapi oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan cara membangun kerjasama dengan berbagai pihak guna memastikan adanya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai bagi seluruh desa yang ada di Jawa Barat, dengan begitu berbagai desa khususnya desa wisata yang ingin mengembangkan desanya menjadi desa wisata berbasis *digital tourism* tidak akan terhambat dikarenakan adanya keterbatasan infrastruktur teknologi informasi.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lokal

Pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* membutuhkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi, mengingat pariwisata berbasis digital menjadikan media teknologi informasi sebagai sarana utama dalam melakukan aktivitas pariwisata.

Kemampuan sumber daya lokal setidaknya terdiri dari tiga pihak yaitu aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa, masyarakat desa serta pelaku usaha wisata. Ketiga pihak tersebut harus memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi yang baik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing dalam penyelenggaraan desa wisata berbasis *digital tourism*.

Pihak pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan aturan kebijakan pengelolaan desa wisata berbasis *digital tourism*. Kualitas aparat pemerintah daerah setidaknya harus menguasai bagaimana promosi dan penyelenggaraan *digital tourism*, mampu berperan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan desa wisata berbasis digital *tourism* serta mampu memahami dan menguasai perkembangan *digital tourism* yang berkembang saat ini.

Pihak pemerintah desa merupakan institusi resmi negara yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan desa wisata yang mana baik atau buruknya penyelenggaraan desa wisata turut ditentukan oleh pemerintah desa. Dalam pengelolaan desa wisata berbasis *digital tourism* maka peran pemerintah desa yang dalam hal ini aparat pemerintah desa harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai penguasaan teknologi informasi mulai dari penggunaan ponsel dan komputer sampai dengan pembuatan konten digital dan promosi pariwisata secara digital.

Pihak masyarakat, peran masyarakat dalam penyelenggaraan desa wisata berbasis *digital tourism* yaitu sebagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata, masyarakat turut serta mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengelolaan, sehingga pemahaman masyarakat dalam pengelolaan *digital tourism* perlu untuk dimiliki, setidaknya masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan alat telekomunikasi seperti telepon genggam dan komputer, sehingga masyarakat selain bisa berinteraksi dengan para wisatawan secara digital, juga mampu mempromosikan dan menjual produk wisata secara langsung kepada para wisatawan secara digital pula.

Pihak pelaku usaha wisata merupakan pihak yang turut serta dalam pengelolaan desa wisata baik sebagai pemilik modal maupun memiliki usaha yang langsung bersinggungan dengan aktivitas pariwisata di desa. Dalam kaitannya dengan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* maka pihak pelaku usaha harus mampu menguasai teknologi informasi yang mana ini dibutuhkan guna menunjang keterlibatan para pelaku usaha dalam kegiatan desa wisata, khususnya guna mempromosikan produk wisata agar menarik minat para wisatawan dan mendatangkan keuntungan bagi para pelaku usaha.

c. Dukungan Pemerintah Daerah

Pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* yang ada di Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pariwisata, didasarkan kepada hal tersebut maka proses pengelolaan desa wisata tersebut membutuhkan anggaran dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, sehingga dukungan pemerintah dalam hal ini adanya anggaran memadai merupakan bagian dari isu yang muncul. Di satu sisi banyak desa wisata yang dapat berkembang menjadi desa wisata berbasis *digital tourism* namun di sisi lain adanya keterbatasan anggaran apabila seluruh desa wisata yang ada tersebut mengajukan untuk mengembangkan diri menjadi desa wisata berbasis *digital tourism* dalam kurun waktu yang bersamaan, sehingga isu anggaran menjadi bagian dari pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Isu lainnya yang penting yaitu bagaimana pemerintah daerah mendukung upaya pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan menyusun instrumen kebijakan yang menyeluruh dan

berkesinambungan, sehingga dijadikan acuan bagi para pihak untuk turut serta dalam pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism*, berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan masih meskipun rencana strategis pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* sudah ada, namun masih belum rinci dan operasional baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

2. Tantangan Yang Muncul Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Digital Tourism* di Provinsi Jawa Barat

Tantangan yang muncul dalam proses pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* tentu saja akan muncul dari berbagai aspek dan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan desa wisata tersebut. Hasil analisis dalam artikel ini setidaknya menemukan 3 (tiga) tantangan yang akan muncul dalam pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu sinergitas antar pemangku kepentingan, konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai. Adapun uraian rinci mengenai ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan

Pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat merupakan usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa, dengan begitu maka adanya sinergitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat harus mampu menjalin kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya.

Sinergitas yang dibangun yaitu bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah memastikan kebijakan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* mampu dipahami oleh semua pihak, sehingga pihak-pihak yang terlibat mampu menjalankan peran dan tugasnya sesuai apa yang telah ditentukan dan tidak akan bertentangan dalam menjalankan peran dan tugasnya tersebut.

Tantangan kedepannya yaitu bagaimana memastikan bahwa berbagai aktor yang terlibat tersebut memastikan tugasnya akan dilaksanakan dengan baik, sehingga pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana tujuan awal yang telah ditentukan.

b. Konsistensi Kebijakan

Kebijakan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat merupakan dasar penting karena akan menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* guna menjalankan tugas dan perannya. Dengan begitu, adanya kebijakan yang pasti, jelas dan tidak berubah-ubah menjadi salah satu dasar dalam keberhasilan mewujudkan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism*.

Tantangan kedepannya yaitu bagaimana kebijakan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* yang telah dibuat mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan mampu menjadi solusi bagi berbagai masalah dalam proses pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism*, sehingga konsistensi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* menjadi bagian yang perlu untuk diperhatikan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari pemerintah Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

c. Dukungan Anggaran yang Memadai

Pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* secara empiris membutuhkan anggaran yang besar, mengingat selain harus mempersiapkan alat penunjang teknologi informasi komunikasi juga pembuatan konten pariwisata secara digital juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, didasarkan kepada pemahaman tersebut maka dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* tersebut.

Tantangan dalam pembangunan desa wisata berbasis *digital tourism* yaitu bagaimana membangun berbagai desa wisata di berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan adanya dukungan anggaran yang memadai, baik berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari Pemerintah Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, dengan begitu maka anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa wisata berbasis *digital tourism* akan mampu mendorong terwujudnya keberhasilan pembangunan desa-desa wisata tersebut.

3. Manfaat Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Digital Tourism*

Pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* secara empiris tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi membutuhkan proses yang mana mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah rekomendasi penulis terhadap proses pengembangan desa wisata berbasis *digital* yang dapat diterapkan:

Berdasarkan kepada gambar tersebut di atas, maka upaya pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* merupakan suatu upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah beserta dengan berbagai pihak lainnya yang mana pihak-pihak tersebut memiliki perannya masing-masing. Adapun manfaat dari mewujudkan desa wisata berbasis *digital tourism* yaitu akan memberikan manfaat setidaknya kepada 3 pihak utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha desa wisata yang mana manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pihak Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu aktor utama dalam mewujudkan desa wisata yang mana pemerintah baik pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat merupakan institusi resmi negara yang memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan pembentukan dan pengelolaan desa wisata, begitupun dengan pengembangan desa wisata berbasis digital tourism.

Adanya upaya pengembangan membangun desa wisata berbasis digital tourism akan memberikan manfaat secara langsung kepada pemerintah yang mana manfaat tersebut antara lain yaitu: Pertama, keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis digital tourism menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yang telah disusun sebelumnya, sehingga keberhasilan ini akan otomatis menjadikan pemerintah sebagai pihak yang dianggap mampu menerapkan kebijakan dengan baik. Di sisi lain pengembangan desa wisata berbasis digital tourism menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengajak semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata berbasis tourism seperti masyarakat dan para pelaku usaha wisata untuk turut bersama-sama mensukseskan kebijakan pengembangan desa wisata berbasis digital tourism.

Kedua, keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis digital tourism secara langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor wisata, sehingga upaya pengembangan sektor wisata kedepannya akan memiliki peluang kecukupan anggaran, sehingga proses pengembangan desa wisata berbasis digital tourism tersebut akan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Ketiga, keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis digital tourism akan membuka peta jalan pengembangan kebijakan pariwisata lebih besar di masa yang akan datang, sehingga akan banyak lagi desa-desa wisata yang sudah berkembang selama ini di Provinsi Jawa Barat akan didorong untuk mengembangkan desa wisata berbasis digital tourism, dengan begitu akan menjadi potensi wisata baru yang akan memberikan dampak kepada pembangunan di daerah.

b. Pihak Masyarakat

Masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan desa wisata yang mana dasar kebijakan pembentukan desa wisata salah satunya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Adanya pengembangan keberhasilan pengelolaan desa wisata berbasis digital tourism bagi masyarakat antara lain yaitu: Pertama, pengembangan desa wisata berbasis digital tourism akan mendorong keterlibatan masyarakat, sehingga akan melahirkan proses pemberdayaan masyarakat dengan begitu masyarakat akan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan desa wisata berbasis digital tourism.

Kedua, keberhasilan pengelolaan desa wisata berbasis kepada digital tourism akan turut serta memajukan perekonomian yang ada di desa tersebut baik perekonomian secara langsung maupun melalui pasar digital, dengan begitu perekonomian masyarakat lokal yang ada di desa tersebut akan meningkat dan diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketiga, pengembangan desa wisata berbasis digital membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun industri ekonomi kreatif, mengingat pangsa sasarannya yaitu masyarakat yang mampu mengakses teknologi informasi, dengan begitu diharapkan masyarakat akan mampu beradaptasi dengan bisnis digital melalui pengembangan ekonomi kreatif.

c. Pihak Pelaku Usaha

Desa wisata sekalipun dasarnya ditujukan untuk pengembangan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat, namun tetap membutuhkan keterlibatan pihak lain yang dalam hal ini investor atau pemilik modal yang berperan baik dalam permodalan maupun dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan desa wisata. Adanya pengembangan desa wisata yang berbasis kepada digital tourism memberikan manfaat kepada para pelaku usaha wisata yang antara lain yaitu: Pertama, modal penyertaan yang dikeluarkan relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan desa wisata secara fisik mengingat adanya pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi yang secara empiris sudah dilakukan oleh pihak lainnya seperti pihak penyedia jasa layanan telekomunikasi.

Kedua, memudahkan dalam melakukan promosi yang mana promosi desa wisata oleh para pelaku usaha selama ini dilakukan baik secara langsung dengan memberikan berbagai promo maupun melalui pemasangan iklan baik secara daring seperti iklan digital maupun secara luring seperti penggunaan baliho dan sebagainya.

Desa wisata berbasis digital tourism karena banyak menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sehingga selain akan memudahkan promosi yang mengintensifkan melalui promosi digital, juga relatif membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan cara konvensional seperti pembuatan baliho dan iklan di papan iklan.

Ketiga, pengembangan desa wisata berbasis digital tourism merupakan bentuk adaptasi para pelaku usaha terhadap keberadaan wisata baru dengan pemanfaatan teknologi informasi, hal ini akan membuka peluang bagi para pelaku usaha wisata untuk mengembangkan wisata secara digital berdasarkan potensi dan kreatifitas masing-masing

SIMPULAN

Pariwisata berbasis *digital tourism* menjadi populer akhir-akhir ini dan menjanjikan potensi yang besar, termasuk bagi desa wisata guna pengembangan pariwisata di masa yang akan datang. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi

yang memiliki banyak desa turut menjadikan *digital tourism* sebagai potensi pengembangan desa wisata, meskipun demikian proses pengembangan desa pariwisata tidak semudah yang diharapkan, setidaknya terdapat isu dan tantangan yang menjadi bagian dalam proses pengembangan kebijakan desa wisata berbasis *digital tourism*.

Isu yang ada dalam proses pengembangan kebijakan desa wisata berbasis *digital tourism* setidaknya mencakup tiga hal yaitu: Pertama, kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya lokal. Ketiga, dukungan pemerintah daerah. Adapun tantangan dalam pengembangan kebijakan yaitu sinergitas antar pemangku kepentingan, konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai. Isu dan tantangan tersebut harus disikapi sebagai peluang untuk mengembangkan desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat berbasis kepada *digital tourism*.

Rekomendasi sebagai upaya pengembangan desa wisata berbasis *digital tourism* di Provinsi Jawa Barat yaitu perlunya komitmen para pemangku kepentingan untuk berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga mampu mewujudkan desa wisata yang berbasis *digital tourism* secara komprehensif dan mampu membawa banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, L., Darmawan, H., and Riyanti, A. (2020). "Pengelolaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 5(3): 306–15.
- Anggariani, B. P., and Paramartha, I. G. N. D. (2021). "Digital Tourism Transformation (Virtual Traveling) Sebagai Solusi Dampak Covid-19 Pada Sektor Pariwisata Di Desa Kampial, Bali." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04(01): 71–77.
- Aryawati, N. P. A. (2020). "Digital tourism: Strategi Menarik Wisatawan Milenial Ke NTB." *Jurnal Hospitality* 9(1): 87–92.
- Atmoko, M. H. (2020). "Dampak Pandemi COVID-19 Pun Sampai Desa." *antaranews.com*. <https://jateng.antaranews.com/berita/304056/dampak-pandemi-covid-19-pun-sampai-desa> (October 9, 2020).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. ed. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indira, D., Ismanto, S. U., and Santoso, M. (2013). "Pencitraan Bandung Sebagai Daerah Tujuan Wisata: Model Menemukan Ikon Bandung Masa Kini." *Jurnal Sosiohumaniora* 15(1): 45–54.
- Mirzaqon, T., Abdi, and Purwoko, B. (2017). "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing." *media.neliti.com*. <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf> (December 6, 2019).
- Nandi. (2005). "Memaksimalkan Potensi Wisata Alam Di Jawa Barat." *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure* 1(1). http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197901012005011-NANDI/artikel_jurnal/Artikel_di_Jurnal_Manajemen_Resort_dan_Leisure.pdf__Potensi_Wisata_Jawa_Barat.pdf.
- Pradana, M. I. W., and Mahendra, G. K. (2021). "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul." *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 3(2): 73–85.
- Raharja, S. J., Chan, A., and Marbun, M. (2019). "Strategi Pengembangan Pariwisata Perdesaan Di Lebakmuncang, Kabupaten Bandung Jawa Barat." *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora* 21(2): 159–65.
- Ratna, D., Edy, S., and Tuhfahtul, H. S. (2021). "Desa Wisata Dan Pandemi Covid-19 (Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Pada Industri Wisata Dengan Pengelolaan Swadaya Masyarakat)." In *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI*, Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 60–64.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanti, D.W. (2013). "Potensi Desa Melalui Pariwisata Perdesaan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12(1): 33–36